



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



DINAS TENAGA KERJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Pongok Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intam Pangkalpinang

Telepon Kantor (0717) 439364, Fax (0717) 439361

Email : disnaker@babelprov.go.id, Web : <http://disnaker.babelprov.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Allah SWT karena atas izin dan ridho-NYA Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip Good Governance sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggung jawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan.

LAKIP Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 ini Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pangkalpinang, Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Tugas dan Fungsi	4
1.5 Struktur Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
2.1 Rencana Strategis Tahun 2017 – 2022	7
2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2021	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	14
3.2 Realisasi Anggaran	21
BAB IV PENUTUP	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya menyelenggarakan pemerintahan tetap berpegang pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi kepada hasil (result oriented goverment) sesuai dengan kewenangannya. Manajemen Pemerintahan memiliki aspek penting yang perlu diimplementasikan yaitu akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur.

Pelaksanaan Renstra Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan visi “Terwujudnya sinergitas dan konektivitas pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri, maju, berkeadilan serta berdaya saing”.

Dari visi tersebut telah dijabarkan dalam 4 (empat) misi Ketenagakerjaan dan 1 (satu) misi Ketransmigrasian yaitu :

- Misi pertama : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang potensial, mandiri dan bertanggungjawab.
- Misi kedua : Menciptakan dan mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang

- berkompeten untuk
menyelenggarakan dan
mengembangkan
keterampilan masyarakat
sesuai dengan kebutuhan
pasar melalui pelatihan
kompetensi dan berbasis
masyarakat.
- Misi ketiga : Menciptakan ketenangan
bekerja dan berusaha melalui
Hubungan Industrial yang
harmonis antara Pemerintah,
Pengusaha dan para pekerja.
- Misi keempat : Menciptakan perlindungan
kerja melalui kesehatan
keselamatan kerja (K3).
- Misi kelima : Menciptakan kawasan
transmigrasi yang
berwawasan C2 dan L4 serta
transmigrasi yang mandiri
dan berwawasan nasional.

Dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya bidang ketenagakerjaan, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan perannya dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tersedianya tenaga kerja yang kompeten, produktif dan berdaya saing sesuai dengan perkembangan pasar kerja serta menciptakan wirausaha baru.
2. Terciptanya Hubungan Industrial (HI) yang harmonis dan pengawasan ketenagakerjaan secara

mandiri, tidak memihak, profesional dan seragam di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Terwujudnya permukiman dan kawasan transmigrasi menjadi tempat tinggal dan tempat usaha yang layak.

Rencana kinerja merupakan serangkaian program dan kegiatan berikut indikator dan target kinerjanya yang harus diwujudkan di tahun 2021. Program yang dilaksanakan tahun 2021 ada 6 (enam) Program yang terdiri dari 1 (satu) Program rutin dan 4 (empat) Program Ketenagakerjaan dan 1 (satu) Program Ketransmigrasian.

- a) Program Rutin meliputi :
 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- b) Program Ketenagakerjaan meliputi :
 - Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 - Program Penempatan Tenaga Kerja;
 - Program Hubungan Industrial;
 - Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
- c) Program Transmigrasi meliputi:
 - Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.

Akuntabilitas kinerja keuangan tahun 2021 ditujukan kepada belanja daerah sesuai dengan sistem keuangan daerah sebagai berikut:

- Realisasi belanja tahun anggaran 2021 Rp. 18.264.161.793,- atau 95,43% dari anggaran Rp. 19.139.115.647,-

Dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Tenaga Kerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan :

- Peningkatan perencanaan di bidang ketenagakerjaan, sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan indikator yang ingin dicapai.
- Peningkatan koordinasi yang lebih baik antara semua bidang dan UPTD yang ada di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka terwujudnya *good governance and clean goverment*.
- Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan, mengurangi pengangguran yang merupakan dampak krisis ekonomi.

- Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu yang diarahkan kepada peningkatan pengupahan, penjaminan kesejahteraan, perlindungan kerja dan kebebasan berserikat.

Pangkalpinang, Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja,
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan sasaran-sasaran dan indikator ketercapaiannya yang secara rinci ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wajib untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa Laporan Kinerja yang disampaikan kepada atasan kepala instansi, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas dan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan Kinerja tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka pelaksanaan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tersebut, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung menyusun Laporan Kinerja periode Tahun 2021.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya di bidang Ketenagakerjaan dan Ketrasmigrasian, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menghadapi permasalahan utama ketenagakerjaan yaitu tingginya angka pengangguran terbuka. Sementara itu di bidang ketrasmigrasian permasalahan yang timbul adalah terbatasnya lahan untuk pembukaan wilayah transmigrasi yang baru dan secara eksternal karena masih sentralistiknya mekanisme pengiriman transmigran, serta adanya *Refocusing* Tahun Anggaran 2021 Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi maka program tersebut tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

Tujuan

Laporan Kinerja disusun dengan tujuan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama

tahun 2021 berdasarkan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 serta Indikator Kinerja Utama Tahun 2021.

1.3 Dasar Hukum

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2009 tentang perubahan terhadap Undang-undang No. 15 Tahun 1997 tentang ketransmigrasian;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,

Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.4 Tugas dan Fungsi

Tugas Pokok Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah :

"Menciptakan sinergitas dan konektivitas pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian yang mandiri dan maju".

Fungsi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

"Menjadikan Dinas Tenaga Kerja sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung".

1.5. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 54 Tahun 2008 tanggal 21 November

2008 tentang Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sesuai Peraturan Daerah tersebut Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja sebagai berikut :

- ✓ Kepala Dinas
- ✓ Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- ✓ Bidang-bidang, terdiri dari :
 1. Bidang Pelatihan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang meliputi:
 - a. Seksi Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi, dan Produktivitas;
 - b. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kerja dan Informasi Pasar Kerja;
 - c. Seksi Transmigrasi.
 2. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, yang meliputi:
 - a. Seksi Pengawasan Tenaga Kerja;
 - b. Seksi Penegakan Hukum Ketenagakerjaan;
 - c. Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial.
 3. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD Balai Latihan Kerja Industri (BLKI), yang meliputi:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan dan Pemasaran;
 - c. Seksi Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan.
- ✓ Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Pegawai Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

Jumlah pegawai pada Tahun 2021 sebanyak 159 orang terdiri atas ASN dan Tenaga Honorer, untuk tenaga ASN berjumlah 95 orang dan tenaga honorer berjumlah 64 orang.

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai PNS Dinas Tenaga Kerja

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	6	0	6
2	S1	47	30	77
3	D3	4	2	6
4	D2	0	0	0
5	SMA	4	2	6
		61	34	95

Tabel 1.5
Jumlah Pegawai Honorer Dinas Tenaga Kerja

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	-	-	-
2	S1	8	15	23
3	D3	2	6	7
4	D2	-	-	0
5	SMA	20	11	31

6	SMP	1	-	1
		32	32	64

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Tahun 2017 - 2022

a. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis

Tujuan

1. Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).

Sasaran

1. Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Ditempatkan;
2. Meningkatnya Produktivitas Kawasan Transmigrasi;
3. Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan;
4. meningkatnya Perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator terlampir dalam tabel di halaman lampiran.

Tabel 2.1
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2017 -2022

NO.	TUJUAN RENSTRA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
				2018	2019	2020	2021	2022
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan	Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	1,6%	3,03%	4,46%	5,59%	6,72%

	nan Ketenagak erjaan (IPK)							
2.		Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi	Persentase produktifitas kawasan transmigrasi	11%	12%	13%	20%	15%
3.		Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan norma K3	12%	15%	18%	21%	25%
4.		Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	2,3%	3,3%	5%	6,6%	8,3%

b. Program pendukung dan prioritas

Program dan kegiatan pendukung, terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Terdiri dari kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah;
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Program dan kegiatan prioritas, terdiri dari:

1. Program Pengawasan Ketenagakerjaan.

Terdiri dari kegiatan :

- Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan;

2. Program Hubungan Industrial.

Terdiri dari kegiatan :

- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota;
- Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah;
- Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

3. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Terdiri dari kegiatan :

- Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi.

4. Program Penempatan Tenaga Kerja

Terdiri dari kegiatan:

- Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
- Pengelolaan Informasi Pasar Kerja;

- Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
5. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
Terdiri dari kegiatan :
- Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan..

2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2021

Kinerja organisasi pada dasarnya adalah bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan dan sasarannya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan memperhatikan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhinya. Perencanaan kinerja Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Penetapan Kinerja adalah Indikator Kinerja yang ditetapkan selama 5 (lima) tahun yang tercantum didalam Renstra Tahun 2017-2022. Sedangkan Perjanjian Kinerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2021 adalah indikator kinerja program yang terdapat dalam RPJMD.

**Tabel 2.2
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021
DINAS TENAGA KERJA**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	DEFINISI OPERASIONAL
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	5,59%	$\frac{\Sigma \text{Tenaga kerja yang ditempatkan}}{\Sigma \text{Pencari kerja yang mendaftar}} \times 100 \%$
2.	Meningkatnya produktifitas kawasan transmigrasi	Persentase produktifitas kawasan transmigrasi	20%	$\frac{\Sigma \text{Hasil produktivitas kawasan transmigrasi}}{\Sigma \text{Kawasan transmigrasi}} \times 100 \%$

3.	Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma ketenagakerjaan	21%	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang dibina}}{\Sigma \text{Seluruh Perusahaan}} \times 100 \%$
4.	Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	6,6%	$\frac{\Sigma \text{Perusahaan yang diuji kesehatannya}}{\Sigma \text{Perusahaan wajib diperiksa kesehatannya}} \times 100 \%$

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja bertujuan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan.

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Persentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik.

Penghitungan persentase pencapaian rencana kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\frac{\text{Rencana Tingkat Capaian}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Persentase Pencapaian}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\frac{\% \text{ Pencapaian kinerja}}{\text{Rencana}} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut :

SKALA NILAI	KATEGORI PENILAIAN
> 100 %	Sangat Baik
80 – 100 %	Baik
50 - < 80 %	Sedang
< 50 %	Kurang

Memperhatikan tugas dan fungsi, maka dalam menghitung pengukuran kinerja rumus yang digunakan adalah rumus 1 dan 2 seperti tersebut diatas.

Selanjutnya atas hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis kinerja untuk mengetahui keberhasilan dan

kegagalan dan pencapaian sasaran strategi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan sebab-sebab tercapai dan tidaknya kinerja yang diharapkan.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Berikut ini tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2021 :

Tabel 3.1.1
Pengukuran Kinerja

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan	5,59%	5,6%
2.	Meningkatnya produktifitas	Persentase produktifitas	20%	0,00%

	kawasan transmigrasi	kawasan transmigrasi		
3.	Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma ketenagakerjaan	21%	26,07%
4.	Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	6,6%	19,1%

Dari tabel 3.1.1 dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator capaian diatas realialisasinya baik.

3.1.2 Realisasi Kinerja Tahun 2021 dan target 2022 sesuai dengan renstra

Berikut ini realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 - 2022.

Tabel 3.1.2
Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Tahun 2022

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target Kinerja 2022	Ket.
1.	Meningkatkan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK).	Meningkatnya Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	Persentase Tenaga Kerja Yang Ditempatkan	5,6%	6,72%	Target tahunan
		Meningkatnya Produktivitas Kawasan Transmigrasi	Presentase Produktivitas Kawasan Transmigrasi	0,00%	15%	Target tahunan
		Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan	Persentase Peningkatan perusahaan yang menjalankan norma K3 dan norma ketenagakerjaan	26,07%	15%	Target tahunan

		Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	Presentase perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan	19,1%	8,3%	Target tahunan

3.1.3 Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja

Dari tabel 3.1.2 dapat dilihat bahwa dari 4 (empat) indikator sasaran diatas, ada 2 (dua) indikator capaian realisasinya baik.

Indikator yang tercapai dengan baik disebabkan oleh perencanaan yang baik dan dilaksanakan dengan konsisten. Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan target erat kaitannya dengan perencanaan anggaran karena volume output yang dikeluarkan tergantung dari seberapa banyak anggaran yang tersedia. Beberapa indikator yang tercapai melebihi target juga disebabkan karena “tidak terganggu” oleh pemotongan anggaran.

Indikator yang tidak tercapai dengan baik disebabkan karena adanya faktor yang menghambat sehingga target tidak tercapai, faktor tersebut sebagai berikut :

1. Adanya perusahaan yang menutup/mengurangi bidang usahanya akibat dampak COVID 19;
2. Sedikitnya lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja;
3. Kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja;
4. Kurangnya informasi, dimana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tau informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga kerja;
5. Kurang meratanya lapangan pekerjaan, banyaknya lapangan pekerjaan di kota, dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan.

Upaya yang akan dilakukan agar target dapat tercapai adalah :

1. Pemerintah harus lebih maksimal lagi dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan *Softskill* budaya malas yang masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja;
2. Pada dasarnya kebijakan untuk menekan tingkat pengangguran harus bertumpu pada peningkatan investasi di sector riil, khususnya pada sector pertanian dan sector industry.

3.1.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya yang digunakan terdiri atas sumber daya manusia dan anggaran. Dari sisi sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah memiliki kualitas pegawai yang cukup baik. Parameternya dapat dilihat dari proporsi pendidikan terakhir pegawai yang paling besar adalah lulusan perguruan tinggi sebesar 93%. Data pendidikan pegawai dapat dilihat pada Tabel 3.1.4 berikut ini.

Tabel 3.1.4
REKAPITULASI JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS
PENDIDIKAN

No.	Jenis Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2	6	0	6
2	S1	47	30	76
3	D3	4	2	6
4	D2	0	0	0
5	SMA	4	2	6
		61	34	95

Sementara itu jika dilihat dari sisi kualitas pegawai, maka perlu ada penambahan pegawai fungsional ketenagakerjaan dan fungsional perencanaan yang sampai saat ini belum ada di Dinas Tenaga Kerja, supaya perencanaan program/kegiatan dan juga anggaran yang ada di Dinas Tenaga Kerja benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat guna mencapai sasaran sesuai target yang telah ditentukan. Saat ini Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung memiliki jabatan fungsional instruktur sebanyak 19 orang pegawai, fungsional pengawas ketenagakerjaan sebanyak 22 orang pegawai, fungsional mediator 4 orang pegawai, fungsional penguji K3 2 orang pegawai, fungsional penggerak swadaya masyarakat sebanyak 1 orang pegawai, dan fungsional umum sebanyak 2 orang pegawai yaitu Fungsional Pranata Humas dan Fungsional Arsiparis.

Dari sisi sumber daya anggaran, serapan anggaran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2021 persentasennya mencapai 95,43%. Begitu juga dengan realisasi fisik yang dihasilkan atau dikenal dengan output mencapai 100%.

3.2 Realisasi Anggaran

Anggaran yang terdapat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran dari APBN terdiri atas dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan. Pagu anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.2
Pagu Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2021

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	TARGET	REALISASI	%		SISA ANGGARAN	
						KEUANGAN	FISIK		
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp 20.939.184.073	Rp 19.139.115.647						
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Rp 20.939.184.073	Rp 19.139.115.647		18.264.161.793	95,43	100,00	Rp 874.953.854	
A	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 18.306.306.204	Rp 17.845.658.083		17.368.893.530	97,33	100,00	Rp 476.764.553
I	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 135.135.623	Rp 79.722.877		66.821.735	83,82	100,00	Rp 12.901.142
	2.07.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 90.621.877	Rp 48.179.877	5 Dokumen	38.476.115	79,86	100,00	Rp 9.703.762
	2.07.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 44.513.746	Rp 31.543.000	3 Dokumen	28.345.620	89,86	100,00	Rp 3.197.380
II	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 14.408.988.308	Rp 14.173.466.000		13.840.314.704	97,65	100,00	Rp 333.151.296
	2.07.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 14.408.988.308	Rp 14.173.466.000	103 Orang	13.840.314.704	97,65	100,00	Rp 333.151.296
III	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 458.874.333	Rp 258.199.206		255.242.032	98,85	100,00	Rp 2.957.174

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

	2.07.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp	22.593.498	Rp	22.593.533	1 Paket	22.593.533	100,00	100,00	Rp	-
	2.07.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp	127.231.332	Rp	85.567.727	1 Tahun	85.567.727	100,00	100,00	Rp	-
	2.07.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp	20.087.619	Rp	20.087.619	1 Tahun	19.999.423	99,56	100,00	Rp	88.196
	2.07.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp	36.729.884	Rp	36.269.327	1 Paket	36.268.496	100,00	100,00	Rp	831
	2.07.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp	13.200.000	Rp	12.000.000	1 Paket	11.910.000	99,25	100,00	Rp	90.000
	2.07.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp	16.000.000	Rp	9.500.000	1 Paket	9.485.000	99,84	100,00	Rp	15.000
	2.07.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp	223.032.000	Rp	72.181.000	1 Paket	69.417.853	96,17	100,00	Rp	2.763.147
IV	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	3.138.197.940	Rp	3.169.160.000		3.054.137.610	96,37	100,00	Rp	115.022.390
	2.07.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	7.397.940	Rp	6.160.000	1 Tahun	4.973.261	80,73	100,00	Rp	1.186.739
	2.07.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	718.000.000	Rp	756.000.000	1 Tahun	642.164.349	84,94	100,00	Rp	113.835.651
	2.07.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp	2.412.800.000	Rp	2.407.000.000	1 Tahun	2.407.000.000	100,00	100,00	Rp	-
V	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	165.110.000	Rp	165.110.000		152.377.449	92,29	100,00	Rp	12.732.551
	2.07.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	4.000.000	Rp	4.000.000	4 Unit Roda empat, 3 Unit Roda Dua	3.146.200	78,66	100,00	Rp	853.800

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

	2.07.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 161.110.000	Rp 161.110.000	1 Tahun	149.231.249	92,63	100,00	Rp 11.878.751
B	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Rp 1.124.402.541	Rp 397.113.887		324.756.282	81,78	100,00	Rp 72.357.605
I	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 993.471.728	Rp 371.013.887		302.444.689	81,52	100,00	Rp 68.569.198
	2.07.03.1.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Rp 871.596.926	Rp 333.043.853	20 Paket	267.229.725	80,24	100,00	Rp 65.814.128
	2.07.03.1.01.02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Rp 121.874.802	Rp 37.970.034	5 Kerja Sama	35.214.964	92,74	100,00	Rp 2.755.070
II	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi	Rp 130.930.813	Rp 26.100.000		22.311.593	85,49	100,00	Rp 3.788.407
	2.07.03.1.04.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 130.930.813	Rp 26.100.000	15 Perusahaan	22.311.593	85,49	100,00	Rp 3.788.407
C	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Rp 213.245.861	Rp 78.912.912		66.328.976	84,05	100,00	Rp 12.583.936
I	2.07.04.1.01	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp 119.366.000	Rp 17.664.051		13.491.285	0	0	Rp 4.172.766
	2.07.04.1.01.01	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Rp 74.751.000	Rp -	30 Orang	0	0	0	Rp -
	2.07.04.1.01.03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Rp 44.615.000	Rp 17.664.051	70 Orang	13.491.285	0	0	Rp 4.172.766

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

II	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Rp	32.631.000	Rp	-		0	0	0	Rp	-
	2.07.04.1.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Rp	32.631.000	Rp	-	2000 Orang	0	0	0	Rp	-
III	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang tidak mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	61.248.861	Rp	61.248.861		52.837.691	86,27	100,00	Rp	8.411.170
	2.07.04.1.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	61.248.861	Rp	61.248.861	25 Perusahaan	52.837.691	86,27	100,00	Rp	8.411.170
D	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rp	805.722.712	Rp	560.221.854		398.087.891	71,06	100,00	Rp	162.133.963
I	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota	Rp	90.448.980	Rp	63.250.980		43.044.980	68,05	100,00	Rp	20.206.000
	2.07.05.1.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Rp	90.448.980	Rp	63.250.980	12 Perusahaan	43.044.980	68,05	100,00	Rp	20.206.000
II	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp	188.607.782	Rp	153.227.782		107.602.190	70,22	100,00	Rp	45.625.592
	2.07.05.1.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Provinsi	Rp	188.607.782	Rp	153.227.782	8 Laporan	107.602.190	70,22	100,00	Rp	45.625.592

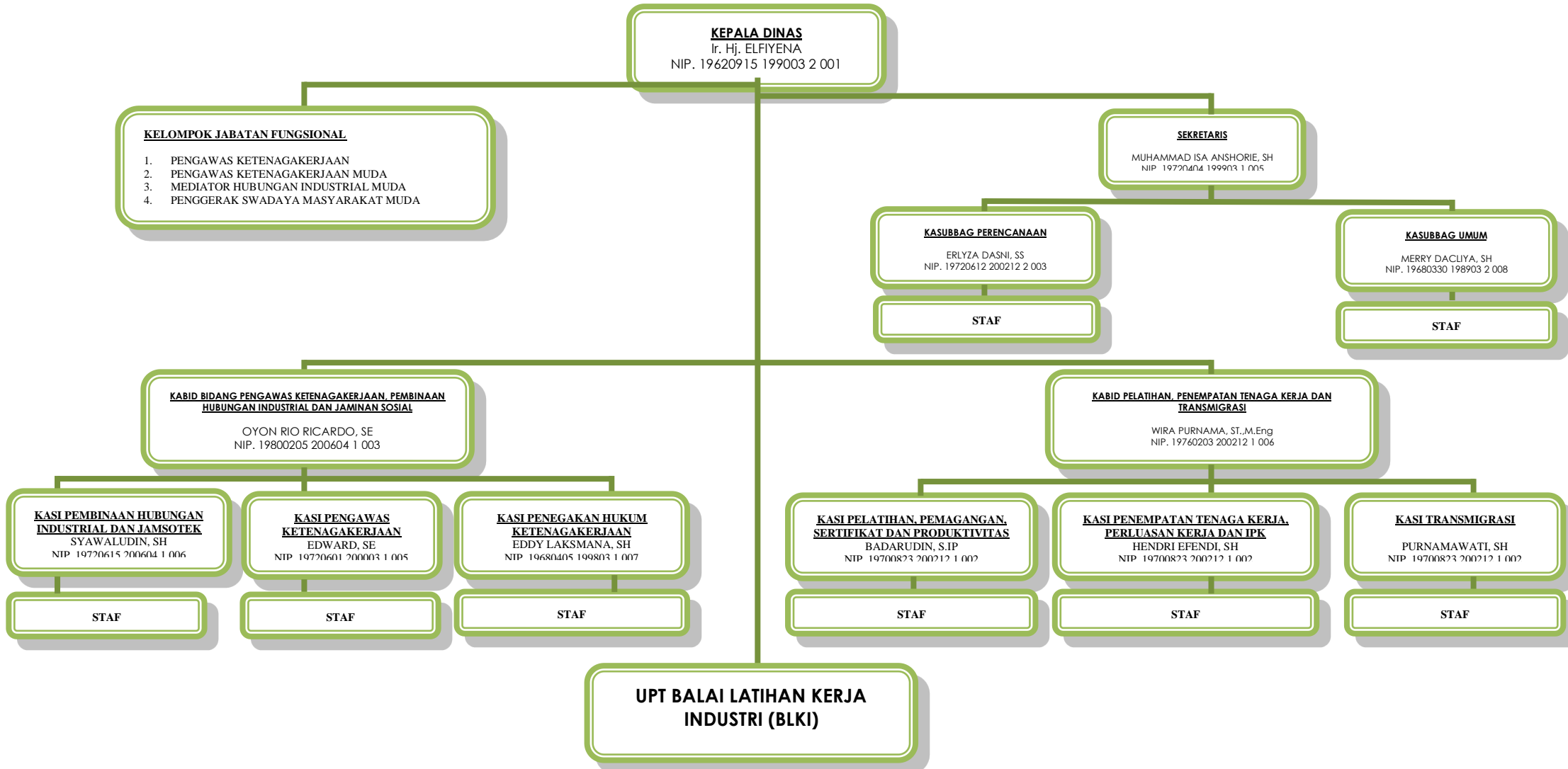
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021

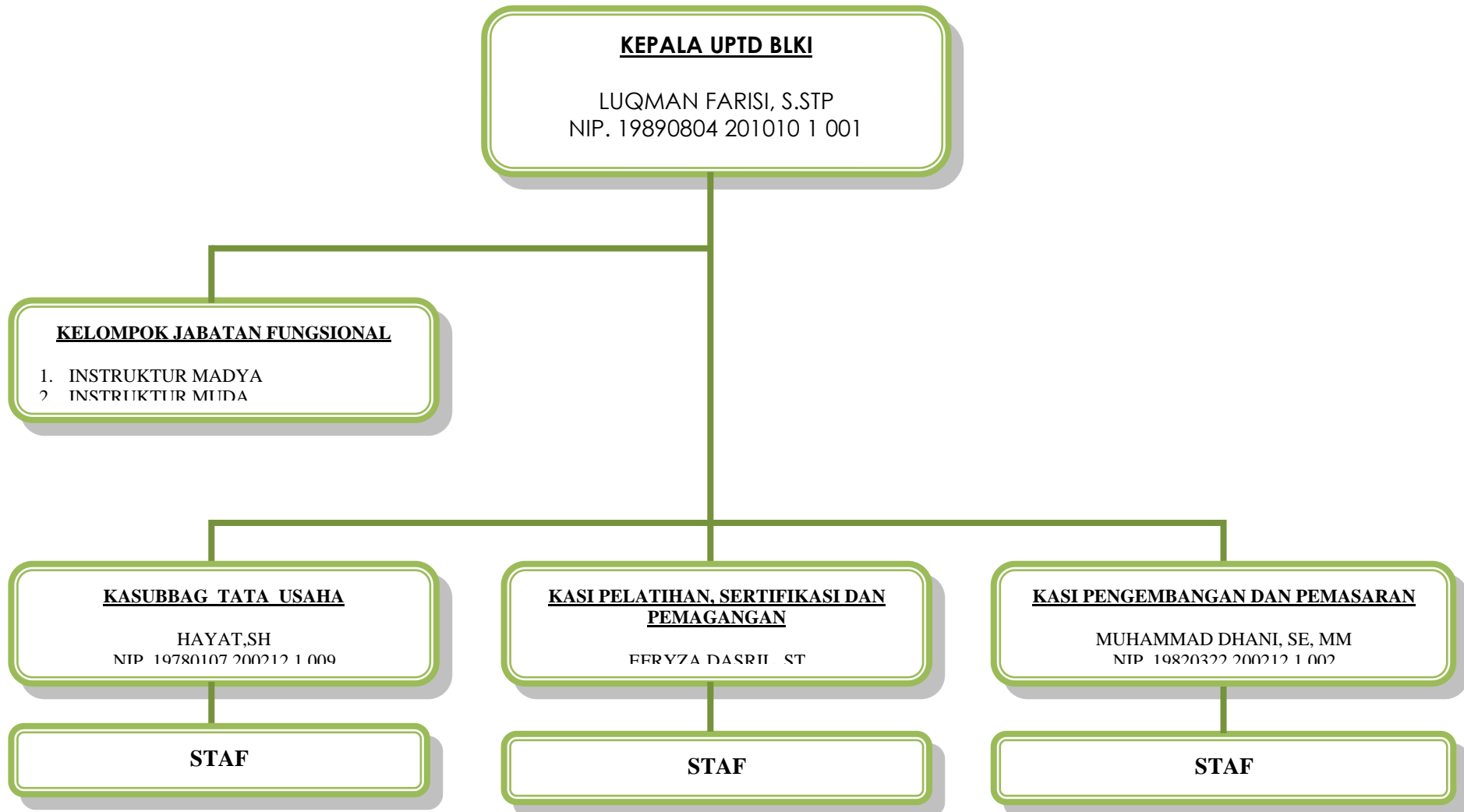
III	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)	Rp 526.665.950	Rp 343.743.092		247.440.721	71,98	100,00	Rp 96.302.371
	2.07.05.1.03.01	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Rp 526.665.950	Rp 343.743.092	1 Rekomendasi	247.440.721	71,98	100,00	Rp 96.302.371
E	2.07.06	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Rp 414.156.775	Rp 257.208.911		106.095.114	41,25	100,00	Rp 151.113.797
I	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Rp 414.156.775	Rp 257.208.911		106.095.114	41,25	100,00	Rp 151.113.797
	2.07.06.1.01.01	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Rp 137.464.514	Rp 137.464.514	19%	106.095.114	77,18	100,00	Rp 31.369.400
	2.07.06.1.01.02	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Rp 186.459.290	Rp 119.744.397	80%	0	0	0	Rp 119.744.397
	2.07.06.1.01.03	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Rp 90.232.971	Rp -	85%	0	0	0	Rp -
F	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Rp 75.349.980	Rp -		0	0	0	Rp -
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan	Rp 75.349.980	Rp -		0	0	0	Rp -
	3.32.04.1.01.01	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Permukiman	Rp 75.349.980	Rp -	30 Orang	0	0	0	Rp -

Tabel 3.3
Pagu Anggaran dan Realisasi APBN Tahun 2021

NO	JENIS ANGGARAN/PROGRAM	PAGU DIPA (Rp)	REALISASI S/D BULAN INI		KET
			KEUANGAN		
			(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6
1.	Dekonsentrasi				
	1. Program Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi	1.512.569.000	1.474.888.800	97,51	
	2. Program Peningkatan Penerapan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	319.395.000	316.693.000	99,15	
	3. Program Dukungan Manajemen Dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja	103.440.000	103.440.000	100	
	JUMLAH I	1.935.404.000	1.895.021.8000	98,88	
2.	Tugas Pembantuan				
	1. Program Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan Dan Transmigrasi	231.088.000	212.460.600	99,71	
	JUMLAH II	231.088.000	212.460.600	99,71	
	JUMLAH I + II	2.166.492.000	2.107.482.400	99,29	

Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





BAB IV

P E N U T U P

Dari hasil pengukuran kinerja yang telah dipaparkan pada Sub bab 3.1.1 dapat disimpulkan bahwa rata-rata nilai yang diperoleh Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan “Sangat Baik”.

1. Sasaran pertama, Meningkatnya tenaga kerja yang ditempatkan, dengan indikator kinerja persentase tenaga kerja yang ditempatkan tidak dapat tercapai dari besaran target, yaitu target sebesar 5,59% dengan realisasi kinerja sebesar 5,6% termasuk dalam kategori “SANGAT BAIK”;
2. Sasaran kedua, Meningkatnya produktivitas kawasan transmigrasi tidak dapat tercapai dari besaran target, yaitu target sebesar 20% dengan realisasi kinerja sebesar 0,0% termasuk dalam kategori “KURANG”;
3. Sasaran ketiga, Meningkatnya pengetahuan para pelaku industri yang mematuhi peraturan ketenagakerjaan dapat tercapai dengan baik, yaitu target sebesar 21% dengan realisasi kinerja sebesar 26,07% termasuk dalam kategori “SANGAT BAIK”;
4. Sasaran keempat, Meningkatnya perusahaan yang patuh terhadap peraturan ketenagakerjaan dapat tercapai dengan baik, yaitu target sebesar 6,6% dengan realisasi kinerja sebesar 19,1% termasuk dalam kategori “SANGAT BAIK”.

Dari 4 sasaran strategis yang hendak dicapai terdapat 2 sasaran yang tidak tercapai sesuai target. Walaupun capaian tidak

tercapai sesuai target, ada 2 sasaran lainnya tercapai sesuai target. Maka dari itu pelaksanaan dan realisasi harus lebih ditingkatkan lagi. Untuk itu ada beberapa langkah-langkah yang harus lebih ditekankan pada masa-masa mendatang, diantaranya meningkatkan kemampuan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan, sehingga tenaga kerja yang tidak dapat ditempatkan dapat menciptakan kesempatan kerja untuk diri sendiri maupun orang lain.

Sedangkan untuk sasaran strategis yang sudah mencapai target tetap akan ditingkatkan dalam upaya optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

Pangkalpinang, Januari 2022

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ir. Hj. ELFIYENA
Pembina Utama Madya
NIP. 19620915 199003 2 001